

**DEMOKRASI BERKEADILAN: PERAN KPU DALAM MENINGKATKAN
PARTISIPASI MASYARAKAT KOTA MATARAM DALAM PILKADA
SERENTAK 2024**

**Dira Novi Santari¹, Komang Sulis Setiawati², Maswana³, Lalu Abdul Hafiz⁴, Lalu Muhammad Arif
Fikri⁵, Muh. Zubair⁶**

diranovisantari@gmail.com¹, suliskomang20@gmail.com², maswanaunram@gmail.com³,
lhfz1510@gmail.com⁴, lalua3918@gmail.com⁵, zubaifkip8@gmail.com⁶

Universitas Mataram

ABSTRAK

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada mencerminkan kualitas pendidikan politik dan keberhasilan demokrasi. Penelitian ini bertujuan untuk menggali faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Kota Mataram dalam Pilkada 2024, serta peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) dalam meningkatkan kesadaran politik melalui sosialisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi pustaka, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor pendorong partisipasi masyarakat meliputi kesadaran politik yang tinggi, efektivitas sosialisasi KPU, dan kondisi sosial-ekonomi yang mendukung. Sebaliknya, faktor penghambat meliputi kurangnya pemahaman tentang proses pemilihan, apatisisme politik, dan praktik politik uang. KPU Kota Mataram telah berusaha meningkatkan partisipasi melalui berbagai strategi sosialisasi, termasuk program Kelurahan Pelopor Demokrasi, pemasangan alat peraga, dan edukasi melalui media sosial. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk memperbaiki pelaksanaan Pilkada di Kota Mataram dan menjadi referensi untuk daerah lain di Indonesia dalam meningkatkan kualitas demokrasi lokal.

Kata Kunci: Peran KPU, Partisipasi Masyarakat, Pilkada Serentak 2024.

ABSTRACT

Community participation in regional elections reflects the quality of political education and the success of democracy. This research aims to explore the driving and inhibiting factors in increasing the participation of the people of Mataram City in the 2024 Pilkada, as well as the role of the General Election Commission (KPU) in increasing political awareness through outreach. The research method used is qualitative with a literature study, interviews, observation and documentation approach. The research results show that the factors driving community participation include high political awareness, the effectiveness of KPU outreach, and supportive socio-economic conditions. On the other hand, inhibiting factors include a lack of understanding of the electoral process, political apathy and the practice of money politics. The Mataram City KPU has tried to increase participation through various outreach strategies, including the Democracy Pioneer Village program, installing visual aids, and education via social media. It is hoped that this research can contribute to improving the implementation of regional elections in Mataram City and become a reference for other regions in Indonesia in improving the quality of local democracy.

Keywords: Role Of The KPU, Community Participation, Simultaneous Regional Elections In 2024.

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara demokrasi yang memberikan hak kepada seluruh warga negaranya untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum, termasuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Pilkada menjadi salah satu instrumen penting untuk memilih pemimpin di tingkat lokal yang memiliki kewenangan dalam mengelola daerah, membangun ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam Pilkada tidak hanya menjadi indikator keberhasilan demokrasi, tetapi juga mencerminkan kualitas pendidikan

politik di masyarakat (Surbakti, 2010). Di Kota Mataram, Pilkada Serentak 2024 menjadi momentum strategis untuk memperkuat demokrasi berkeadilan dengan melibatkan masyarakat secara luas dalam proses pemilihan.

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, mulai dari melaksanakan pendidikan politik, menjadi panitia penyelenggara, terlibat dalam kampanye politik, hingga memberikan suara sebagai pemilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Menurut Verba, Schlozman, dan Brady (1995), partisipasi politik dapat diartikan sebagai segala bentuk aktivitas yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk memengaruhi proses pengambilan keputusan politik. Di Kota Mataram, bentuk-bentuk partisipasi ini menjadi elemen penting dalam menciptakan Pilkada yang inklusif dan representatif. Namun, tingkat partisipasi masyarakat Kota Mataram dalam Pilkada sering kali dihadapkan pada tantangan. Salah satu faktor pendorong utama adalah kesadaran politik masyarakat yang tinggi. Masyarakat yang memahami pentingnya hak pilih cenderung lebih aktif dalam proses Pilkada. Selain itu, efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) juga berperan besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Sosialisasi yang masif, terutama melalui media sosial dan komunitas lokal, terbukti efektif dalam menjangkau berbagai lapisan masyarakat (Rasyid, 2020).

Namun, terdapat pula berbagai faktor penghambat yang dapat mengurangi partisipasi masyarakat. Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai proses pemilihan sering kali menjadi kendala utama. Hal ini diperburuk oleh apatisme terhadap politik, di mana masyarakat merasa bahwa hasil pemilihan tidak akan berdampak langsung pada kehidupan mereka (Santoso, 2019). Selain itu, praktik politik uang yang masih marak terjadi di beberapa daerah, termasuk Kota Mataram, dapat merusak integritas Pilkada dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi (Aspinal & Sukmajati, 2016). Dalam menghadapi tantangan tersebut, KPU memiliki peran strategis untuk memastikan partisipasi masyarakat tetap tinggi. Salah satu peran utama KPU adalah melakukan sosialisasi Pilkada secara intensif. Program-program sosialisasi yang dirancang KPU, seperti diskusi publik, pemasangan alat peraga kampanye (APK), dan kampanye kreatif melalui media digital, bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya berpartisipasi dalam Pilkada (Effendi, 2018). Di Kota Mataram, langkah-langkah ini menjadi bagian dari strategi KPU untuk merangkul semua kelompok masyarakat, termasuk generasi muda.

Selain sosialisasi, KPU juga bertanggung jawab untuk memastikan aksesibilitas informasi bagi seluruh masyarakat. Dalam konteks Kota Mataram, keberhasilan Pilkada sangat bergantung pada bagaimana KPU menjangkau masyarakat yang tinggal di wilayah yang sulit diakses, serta memastikan mereka mendapatkan informasi yang cukup untuk menggunakan hak pilih mereka secara bijak. Menurut Huntington (1991), institusi yang kuat dan terpercaya adalah kunci utama dalam menjaga kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi. Lebih jauh lagi, KPU juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan Pilkada yang bersih dan bebas dari politik uang. Masyarakat yang merasa bahwa proses Pilkada berlangsung secara adil dan transparan cenderung lebih termotivasi untuk ikut serta. Di Kota Mataram, upaya ini membutuhkan kolaborasi antara KPU, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil untuk mengawasi jalannya Pilkada agar tetap sesuai dengan prinsip demokrasi (Putra, 2020).

Faktor sosial budaya juga menjadi elemen penting dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat Kota Mataram. Tradisi gotong royong dan kekeluargaan yang kuat di masyarakat Lombok dapat menjadi modal sosial untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam Pilkada. Pendekatan berbasis budaya, seperti melibatkan tokoh adat dan agama, dapat digunakan oleh KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat (Effendi, 2018). Dengan demikian, Pilkada dapat menjadi momentum untuk memperkuat ikatan sosial sekaligus memperkuat legitimasi pemimpin terpilih. Tingkat partisipasi masyarakat juga sangat dipengaruhi oleh persepsi mereka terhadap calon pemimpin. Calon yang memiliki rekam jejak

baik dan program kerja yang relevan dengan kebutuhan masyarakat cenderung mendapatkan dukungan yang lebih besar. Di Kota Mataram, KPU dapat memfasilitasi diskusi publik atau debat kandidat untuk membantu masyarakat memahami visi dan misi para calon secara lebih mendalam. Langkah ini dapat membantu masyarakat membuat keputusan yang lebih rasional dan bertanggung jawab.

Oleh karena itu, Pilkada Serentak 2024 di Kota Mataram menjadi momentum penting untuk mengukur sejauh mana demokrasi berkeadilan dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat yang aktif. Dengan mengidentifikasi bentuk-bentuk partisipasi, memahami faktor pendorong dan penghambat, serta mengevaluasi peran KPU, diharapkan Pilkada dapat berlangsung dengan lebih berkualitas. Penelitian ini bertujuan memberikan kontribusi nyata untuk peningkatan kualitas demokrasi lokal di Kota Mataram, sekaligus menjadi referensi bagi pelaksanaan Pilkada di daerah lain di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam studi ini adalah penelitian kualitatif dan penelitian kepustakaan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena secara mendalam dengan menggali perspektif informan. Melalui pendekatan ini, peneliti menunjukkan tanggung jawab dalam memberikan penjelasan yang mendalam dan ilmiah guna memahami berbagai variasi dalam fenomena yang diteliti. Di samping itu, penelitian kepustakaan digunakan untuk mendukung penelitian dengan teori dan referensi yang relevan, sebagaimana dijelaskan oleh (Adlini et al., 2022). Pelaksanaan kegiatan berlangsung menuju KPU di Kota Mataram untuk mengetahui lebih lanjut peran dari KPU itu sendiri. Penelitian ini berfokus pada para bagaimana peran KPU atau strategi dari KPU untuk meningkatkan partisipasi masyarakat kota mataram dalam melaksanakan pemilihan serentak 2024. Target dari penelitian ini yaitu mengetahui keaktifan atau keikutsertaan masyarakat dalam memilih para calon sehingga penyelenggaraan atau hak suara dari setiap individu dapat terealisasikan. Prosedur penelitian dilaksanakan melalui beberapa tahap pengumpulan data diantaranya yaitu wawancara dengan pihak atau petugas KPU kota Mataram, di sini kami mewawancarai dengan mengupas tuntas permasalahan sebab maupun akibat yang terkait dengan partisipasi politik lebih tepatnya pada pemilihan serentak 2024 tahun ini. Kemudian ada Observasi, yang di mana peneliti mengamati prosedur atau informasi serta data-data yang ditunjukkan petugas KPU Kota Mataram. Dan studi dokumen atau dokumentasi dalam hal ini peneliti memfoto/video data serta merekam informasi penting lainnya yang telah disampaikan. (Susanti, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk-bentuk Partisipasi Masyarakat Kota Mataram

a. Melaksanakan Pendidikan Pilkada

Pendidikan pemilih bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek Pilkada, seperti pendaftaran pemilih, visi, misi, dan program calon, serta proses pemungutan dan penghitungan suara. Kegiatan ini dapat dilakukan oleh organisasi masyarakat sipil, termasuk LSM dan organisasi kemasyarakatan yang independen dan tidak terafiliasi dengan partai politik. Pendidikan pemilih merupakan proses transfer pengetahuan yang tidak hanya menjelaskan apa dan bagaimana Pilkada berlangsung, tetapi juga menekankan pentingnya Pilkada bagi masyarakat. Fokus pendidikan pemilih mencakup tahapan-tahapan tertentu, seperti pendaftaran dan pemutakhiran daftar pemilih, pertimbangan dalam memilih atau tidak memilih, serta proses pemberian suara di TPS. Pada aspek pendaftaran, penekanan diberikan pada alasan pentingnya mendaftar sebagai pemilih, bukan sekadar memahami persyaratan, waktu, dan lokasi pendaftaran. Demikian pula, dalam memberikan suara, pendidikan pemilih tidak hanya menyoroti prosedur sah, tetapi juga alasan mengapa seseorang perlu memilih dan mempertimbangkan isu-isu kebijakan publik yang relevan dalam menentukan pilihan terhadap

calon atau partai tertentu.

Menurut Usfinit et al. (2015), jika pendidikan pemilih dilakukan secara luas dan efektif, hal ini dapat meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam Pilkada. Sosialisasi Pilkada serentak 2024 oleh para relawan menjadi salah satu bentuk pelaksanaan pendidikan pemilih yang berupaya menjangkau masyarakat secara langsung. Masyarakat Kota Mataram turut aktif dalam menyukseskan Pilkada 2024 dengan mengikuti sosialisasi yang diadakan. Partisipasi ini menunjukkan kesadaran tinggi masyarakat akan pentingnya pemahaman terhadap proses demokrasi dan pemilu. Melalui sosialisasi tersebut, warga diberikan informasi yang jelas mengenai tahapan Pilkada, hak dan kewajiban pemilih, serta cara-cara untuk berpartisipasi secara baik dan benar dalam pemilihan. Meskipun respon masyarakat bermacam-macam, beberapa masyarakat menerima relawan dengan tangan terbuka dan menghargai kontribusi mereka dalam memberikan informasi tentang proses pilkada. Ada juga yang tidak peduli atau kurang tertarik karena masyarakat kurang berminat untuk mendengarkan sosialisasi.

b. Menjadi Panitia dalam Pilkada

KPU mendorong masyarakat agar ikut berpartisipasi mendaftar menjadi anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) untuk pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak 27 November 2024. Partisipasi masyarakat itu menjadi salah satu bentuk dukungan menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak di kota Mataram. Banyaknya masyarakat kota Mataram yang ikut berpartisipasi menjadi petugas KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) dalam Pilkada Serentak 2024, yaitu sebanyak 4067 orang, menunjukkan tingginya kesadaran dan partisipasi warga dalam proses demokrasi. Hal ini tidak hanya mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap pemilu, tetapi juga meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pilkada dengan melibatkan lebih banyak individu yang berperan dalam kelancaran pemungutan suara. Partisipasi ini mencerminkan semangat masyarakat untuk mendukung terciptanya pilkada yang adil dan berjalan dengan lancar.

c. Terlibat dalam Kampanye Politik

Kampanye Pilkada di Kota Mataram dilaksanakan oleh masyarakat dengan berbagai cara, termasuk konvoi kendaraan dan melalui media sosial. Konvoi menjadi salah satu metode yang sering digunakan untuk menunjukkan dukungan terhadap calon kepala daerah, sementara media sosial digunakan sebagai platform untuk menyebarkan informasi, ide, serta mengajak warga untuk berpartisipasi dalam pemilihan. Kedua metode ini memperlihatkan antusiasme dan upaya masyarakat Kota Mataram dalam mendukung calon-calon yang mereka percayai, serta untuk meningkatkan kesadaran politik di kalangan pemilih.

d. Memberikan suara sebagai pemilih di TPS

Masyarakat Kota Mataram turut berpartisipasi aktif dalam memberikan suara pada Pilkada Serentak 2024. Antusiasme pemilih terlihat jelas saat warga Kota Mataram datang ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) untuk menyalurkan hak pilih mereka, menunjukkan kesadaran politik yang tinggi dan komitmen dalam proses demokrasi. Partisipasi ini menjadi salah satu indikator penting dalam menentukan kualitas pemilihan kepala daerah di Kota Mataram. Itu bisa dilihat dari rapat pleno terbuka rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Walikota dan Wakil Walikota Mataram sebanyak 320.604 pemilih tetap yang terdaftar dalam enam kecamatan di Kota Mataram.

2. Faktor Pendorong dan Penghambat dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Kota Mataram dalam Pilkada Serentak 2024

Partisipasi masyarakat dalam Pilkada merupakan salah satu elemen penting dalam mewujudkan demokrasi yang inklusif dan berkeadilan. Tingkat partisipasi ini mencerminkan sejauh mana masyarakat memahami dan memanfaatkan hak politik mereka untuk memilih pemimpin yang akan menentukan arah kebijakan di daerah mereka. Menurut Verba, Schlozman, dan Brady (1995), partisipasi politik adalah tindakan individu atau kelompok yang bertujuan memengaruhi proses pengambilan keputusan politik secara langsung maupun tidak langsung. Di

Kota Mataram, Pilkada Serentak 2024 menjadi tantangan sekaligus peluang untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam proses politik lokal. Namun, tingkat partisipasi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik pendorong maupun penghambat, yang harus dipahami untuk menciptakan strategi yang efektif.

a. Faktor Pendorong

1) Tingginya Kesadaran Politik

Salah satu faktor utama yang mendorong partisipasi masyarakat adalah tingginya kesadaran politik. Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik tentang pentingnya Pilkada cenderung lebih aktif dalam menggunakan hak pilih mereka. Hal ini sejalan dengan temuan Effendi (2018), yang menyebutkan bahwa masyarakat dengan tingkat literasi politik tinggi cenderung berpartisipasi aktif dalam pemilu karena mereka melihat pentingnya suara mereka dalam menentukan masa depan daerah. Di Kota Mataram, kesadaran politik ini dapat diperkuat melalui pendidikan politik yang melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintah, komunitas lokal, dan institusi pendidikan.

2) Efektivitas Sosialisasi yang dilakukan Oleh KPU

Selain itu, efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPU juga menjadi faktor pendorong yang signifikan. Sosialisasi yang dirancang dengan baik, seperti melalui media sosial, diskusi publik, dan pemasangan alat peraga kampanye (APK), mampu meningkatkan pemahaman masyarakat tentang proses pemilihan. Menurut Rasyid (2020), KPU yang berhasil menjangkau seluruh lapisan masyarakat melalui strategi komunikasi yang inovatif dapat meningkatkan angka partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda. Di Kota Mataram, program-program ini perlu terus ditingkatkan agar lebih inklusif dan mampu menjangkau kelompok marginal.

3) Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Kondisi sosial ekonomi masyarakat juga menjadi faktor pendorong yang penting. Masyarakat dengan akses yang baik terhadap pendidikan, pekerjaan, dan fasilitas publik cenderung lebih peduli terhadap keberlangsungan pemerintahan di daerah mereka. Santoso (2019) menyebutkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat yang tinggi berkontribusi pada peningkatan partisipasi politik, karena masyarakat lebih memiliki waktu dan sumber daya untuk terlibat dalam kegiatan politik. Di Kota Mataram, dengan statusnya sebagai ibu kota provinsi, potensi ini dapat dimanfaatkan untuk mendorong keterlibatan masyarakat dalam Pilkada.

b. Faktor Penghambat

1) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses Pemilihan

Di sisi lain, partisipasi masyarakat juga dihambat oleh berbagai faktor. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses Pilkada menjadi salah satu kendala utama. Banyak masyarakat yang belum sepenuhnya memahami tahapan pemilihan, visi-misi calon, atau pentingnya suara mereka dalam menentukan hasil Pilkada. Surbakti (2010) menjelaskan bahwa rendahnya literasi politik sering kali menjadi penyebab apatisme, di mana masyarakat merasa tidak memiliki pengaruh dalam sistem politik yang ada. Hal ini menjadi tantangan bagi KPU Kota Mataram untuk meningkatkan edukasi politik secara lebih efektif.

2) Apatisme terhadap Politik

Apatisme terhadap politik juga menjadi penghambat yang signifikan. Masyarakat yang merasa bahwa politik tidak memberikan dampak langsung pada kehidupan mereka cenderung memilih untuk tidak berpartisipasi. Putra (2020) menyebutkan bahwa sikap skeptis terhadap integritas calon pemimpin atau proses pemilu sering kali membuat masyarakat kehilangan kepercayaan pada sistem demokrasi. Di Kota Mataram, fenomena ini dapat diminimalkan dengan memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan Pilkada.

3) Kurangnya Kesadaran dalam Mengurus Administrasi Pindah untuk Memilih

Kurangnya kesadaran untuk mengurus administrasi pindah memilih menjadi salah satu masalah yang signifikan dalam pelaksanaan pemilu di Kota Mataram. Banyak warga yang, karena alasan pekerjaan atau kesibukan lainnya, menjadi kurang peduli dan enggan untuk meluangkan waktu mengurus pindah memilih meskipun mereka berada di luar daerah tempat mereka terdaftar sebagai pemilih. Selain itu, minimnya pengetahuan tentang prosedur pindah memilih juga memperburuk keadaan, terutama bagi mereka yang tidak mendapatkan informasi yang memadai dari pihak berwenang. Hal ini mencerminkan masih lemahnya sosialisasi dan edukasi yang dilakukan, sehingga banyak masyarakat yang tidak menyadari pentingnya pengurusan administrasi pindah memilih sebagai bentuk tanggung jawab dalam menggunakan hak pilih mereka. Akibatnya, banyak warga yang akhirnya tidak berpartisipasi dalam pemilu, yang secara tidak langsung berdampak pada tingkat partisipasi pemilih di Kota Mataram secara keseluruhan.

3. Strategi KPU dalam meningkatkan partisipasi masyarakat

a. Sosialisasi Pilkada

Sosialisasi dari KPU kepada masyarakat adalah mengenai hal-hal teknis Pilkada seperti tata cara pencoblosan, sosialisasi tidak hanya dilakukan kepada masyarakat umum tetapi sosialisasi juga dilaksanakan kepada segmen-segmen seperti penyandang disabilitas anak sekolah dan tidak hanya bertempat di dalam ruangan saja namun juga dilangsungkan dengan cara membagikan brosur di lingkungan terbuka. KPU Kota Mataram memiliki program Kelurahan Pelopor Demokrasi, tidak semua program ini diterapkan kepada seluruh kelurahan yang ada di kota Mataram hanya ditargetkan pada wilayah yang rendah partisipasinya dalam pemilihan kepala daerah salah satunya kelurahan Bintaro, model program tersebut dilaksanakan dengan membentuk kaderisasi untuk menjadi agen-agen di kelurahan tersebut. Kebanyakan yang menjadi pelopor dari program tersebut adalah mahasiswa atau anak-anak muda yang sudah bekerja. Kegiatan sosialisasi juga dibarengi dengan nonton bareng film-film tentang pemilu yang diproduksi oleh KPU RI

b. Pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK)

Di musim Pilkada sudah menjadi tugas KPU dalam memasang Alat Peraga Kampanye (APK) berupa spanduk, poster, dan baliho. Bahkan KPU ingin menambah pemasangan spanduk, poster, dan baliho pada dua puluh titik di Kota Mataram untuk memasivkan informasi agar masyarakat tahu tentang pasangan calon kepala daerah. Selain itu pemasangan video troon juga menjadi upaya efektif untuk memberitahukan kepada masyarakat tentang Pilkada. Pemasangan APK, pu tetap mengacu kepada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dan juga mengacu kepada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

c. Pemanfaatan Media Sosial

KPU Kota Mataram memanfaatkan berbagai platform media sosial seperti Instagram, Facebook, WhatsApp, dan lainnya untuk mendukung pelaksanaan Pemilu Serentak 2024 dengan tujuan meningkatkan partisipasi pemilih dan menyebarkan informasi secara efektif. Melalui Instagram dan Facebook, KPU secara aktif membagikan konten edukasi berupa infografis, video pendek, dan siaran langsung yang menjelaskan tahapan pemilu, tata cara pemungutan suara, pentingnya peran masyarakat dalam memilih, hingga ajakan untuk melawan hoaks terkait pemilu. WhatsApp digunakan untuk komunikasi lebih personal, seperti menyebarkan informasi langsung kepada kelompok masyarakat atau komunitas, serta sebagai kanal interaksi bagi masyarakat yang membutuhkan informasi atau klarifikasi. Selain itu, media sosial ini juga dimanfaatkan untuk menjangkau generasi muda, mengingat tingginya penggunaan platform

digital oleh kelompok tersebut, sehingga pesan-pesan terkait pemilu dapat diterima dengan lebih luas dan tepat sasaran. Dengan pendekatan ini, KPU Kota Mataram tidak hanya memastikan keterbukaan informasi, tetapi juga menciptakan ruang dialog antara penyelenggara pemilu dan masyarakat untuk meningkatkan kepercayaan dan partisipasi publik dalam pemilu.

KESIMPULAN

Partisipasi masyarakat Kota Mataram dalam Pilkada Serentak 2024 menunjukkan adanya kesadaran politik yang tinggi serta komitmen warga dalam mendukung proses demokrasi lokal. Bentuk-bentuk partisipasi yang terwujud antara lain melalui pendidikan pemilih, keterlibatan sebagai panitia pemungutan suara (KPPS), dukungan dalam kampanye politik, serta memberikan suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Masyarakat Kota Mataram juga menunjukkan antusiasme melalui berbagai cara seperti sosialisasi Pilkada, konvoi kendaraan, dan penggunaan media sosial untuk meningkatkan kesadaran politik. Namun, meskipun ada partisipasi yang signifikan, beberapa faktor pendorong dan penghambat memengaruhi tingkat partisipasi masyarakat. Faktor pendorong utama meliputi tingginya kesadaran politik, efektivitas sosialisasi yang dilakukan oleh KPU, serta kondisi sosial-ekonomi masyarakat yang mendukung keterlibatan politik. Sementara itu, penghambatnya termasuk kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses Pilkada, apatisme terhadap politik, dan kurangnya kesadaran untuk mengurus administrasi pindah memilih. Untuk meningkatkan partisipasi, KPU Kota Mataram telah mengimplementasikan berbagai strategi, seperti sosialisasi yang melibatkan segmen-segmen masyarakat tertentu, pemasangan alat peraga kampanye (APK) di berbagai titik, serta pemanfaatan media sosial untuk menjangkau pemilih muda dan meningkatkan transparansi informasi. Dengan terus memperkuat edukasi politik dan menjaga integritas proses Pilkada, diharapkan partisipasi masyarakat dapat terus meningkat, menciptakan Pilkada yang berkualitas, inklusif, dan berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974-980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Aspinal, E., & Sukmajati, M. (2016). *Politik Uang di Indonesia: Patronase dan Klientelisme pada Pemilu Legislatif 2014*. Yogyakarta: PolGov.
- Effendi, S. (2018). *Strategi Sosialisasi Pemilu dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih*. Jakarta: Kementerian Dalam Negeri.
- Huntington, S. P. (1991). *The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century*. Norman: University of Oklahoma Press.
- Putra, I. N. D. (2020). "Integritas dan Transparansi dalam Pilkada: Studi Kasus Kota Denpasar." *Jurnal Politik Indonesia*, 15(2), 45–62.
- Rasyid, H. (2020). *Pendidikan Politik dan Partisipasi Pemilih di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Santoso, S. (2019). "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Golput dalam Pilkada: Analisis di Kota Medan." *Jurnal Demokrasi Lokal*, 12(3), 25–38.
- Surbakti, R. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Susanti, S. D. (2015). Integrasi Nilai-Nilai Demokrasi Dalam Pembelajaran Ips Di Smp Negeri 13 Yogyakarta. *Biomass Chem Eng*, 49(236), 4068. https://eprints.uny.ac.id/53740/4/TAS_BAB_III_13416241020.pdf
- Usfinit, Y., Suprojo, A., & Setyawan, D. (2015). Perspektif partisipasi politik masyarakat pada pemilihan kepala daerah (pilkada) kota Malang. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (JISIP)*, 3(1).
- Verba, S., Scholzman, K. L., & Brady, H. E. (1995). *Voice and Equality: Civic Voluntarism in American Politics*. Cambridge: Harvard University Press